

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 5/POJK.03/2015 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN  
PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI  
MINIMUM PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP  
PEMEGANG SAHAM BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS  
PADA PT BPR UGM)**

Oleh: Lubna Faiqotul 'Ula<sup>1</sup> Veri Antoni, S.H., M.Hum<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini memiliki dua (2) tujuan, yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi praktik di lapangan dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi pemegang saham BPR terkait larangan distribusi laba yang diamanatkan oleh Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat.

Penelitian ini adalah sebuah penulisan hukum yang menggabungkan metode yuridis dan metode empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara dengan responden dan narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi praktik di lapangan dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya berdasarkan pada Peraturan OJK, tetapi juga menggunakan Peraturan OJK lainnya yang menunjang ketentuan tersebut. Larangan distribusi laba bagi BPR yang belum memenuhi KPMM BPR tidak mengurangi perlindungan hukum pemegang saham BPR.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat, Pemegang Saham

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Skripsi, Fakultas Hukum, Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**JURIDICAL ANALISYS OF OJK RULE NUMBER 5/POJK.03/2015 YEAR  
2015 CONCERNING MINIMUM CAPITAL LIABILITY PROVISION AND  
MINIMUM MAIN CAPITAL FULFILLMENT OF RURAL BANKS TO  
RURAL BANK'S SHARE HOLDERS (CASE STUDY OF PT BPR UGM)**

By: Lubna Faiqotul 'Ula<sup>3</sup> Veri Antoni S.H., M.Hum<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

This study has two goals, the first is to determine the condition of the practice on society in terms of KPMM provision and minimum main capital which done by Rural Banks. The second is to determine the implementation of legal protection for the Rural Bank's shareholders due to provit distribution prohibition mandated by OJK Rule Number 5/POJK.03/2015 year 2015 concerning KPMM Provision and Minimum Main Capital Fulfillment of Rural Banks.

This study is a legal writing which combine juridical methods and empirical methods by using primary and secondary data. This study is completed by doing library reseach in order to obtain secondary data that consist legal sources of primary, secondary, and tertiary and field research to obtain primary data by interviewing the respondents and informants.

According to the reseach, the condition of the practice on society in terms of KPMM provision and minimum capital fulfillment of Rural Bank is done not only based on OJK Rule Number 5/POJK.03/2015 year 2015 concerning KPMM Provision and Minimum Main Capital Fulfillment of Rural Banks but also using other OJK rules that related to the substances. In terms of legal protection for Rural Bank's shareholders, the OJK Rule is a tool to protect institution of Rural Bank from negative impacts of KPMM provision and minimum main capital fulfillment violation, including law protection of Rural Bank's shareholders itself.

**Keywords:** Otoritas Jasa Keuangan, rural bank, share holder

---

<sup>3</sup> Student of Business Law Departement, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Lecturer of Business Law Departement, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada